

# **Determinan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Joint Trade Committee (JTC) dengan Mesir pada Tahun 2023**

**Yoga Ramadhani  
Putri Alyaa Safira  
Bintang Corvi Diphda**

*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya  
Indonesia*

e-mail: [yogacuteboy@student.ub.ac.id](mailto:yogacuteboy@student.ub.ac.id), [safiraalyaa@student.ub.ac.id](mailto:safiraalyaa@student.ub.ac.id),  
[bintangcorvio58@student.ub.ac.id](mailto:bintangcorvio58@student.ub.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This study explores the determining factors influencing Indonesia's foreign policy in the context of establishing the Joint Trade Committee (JTC) with Egypt in 2023. This research employs a qualitative approach with a case study design. The findings indicate that Indonesia's foreign policy in forming the JTC with Egypt is driven by strategic economic calculations based on national strength, participatory domestic political dynamics, and international geopolitical opportunities. Indonesia actively utilizes a peaceful economic diplomacy approach to reinforce its position as a middle power that relies on soft power. The cooperation also reflects a strategic response to domestic pressures such as economic slowdown and a deliberate effort to diversify economic partnerships in the Middle East and North Africa (MENA) region. Therefore, the formation of the JTC shows a rational, adaptive, and long-term oriented foreign policy.*

**Keywords: Indonesia's Foreign Policy; Joint Trade Committee (JTC); Indonesia-Egypt; Bilateral Cooperation**

*Penelitian ini membahas faktor determinan yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks pembentukan Joint Trade Committee (JTC) bersama Mesir pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam membentuk JTC dengan Mesir didorong oleh kalkulasi ekonomi strategis yang berpijak pada kekuatan nasional, dinamika politik domestik yang partisipatif, serta peluang geopolitik internasional. Indonesia memanfaatkan pendekatan diplomasi ekonomi secara aktif dan damai untuk memperkuat posisi sebagai middle power yang mengandalkan soft power. Kerja sama ini juga merefleksikan respons terhadap tekanan domestik seperti perlambatan ekonomi, serta upaya diversifikasi mitra dagang di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Dengan demikian, pembentukan JTC menunjukkan kebijakan luar negeri yang rasional, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.*

**Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Joint Trade Committee (JTC); Indonesia-Mesir; Kerjasama Bilateral**

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang menekankan pada kemandirian dalam menentukan arah kebijakan dan keaktifan dalam menciptakan perdamaian serta keadilan dunia (Karim, 2021). Dalam implementasinya, asas ini memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara tanpa terikat blok kekuatan tertentu, termasuk dengan negara-negara di kawasan Afrika yang memiliki kedekatan historis dan nilai strategis tersendiri (Simatupang & Panggabean, 2022).

Kawasan Afrika menjadi salah satu fokus dalam politik luar negeri Indonesia, sebagaimana terlihat dari sejarah panjang solidaritas yang dimulai sejak Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 (Tutukansa, 2023). Hubungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berkembang menjadi kerja sama konkret di bidang ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Republik Arab Mesir merupakan salah satu negara Afrika yang memiliki hubungan paling erat dengan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir pada tahun 1947 menjadi awal dari hubungan diplomatik yang terus diperkuat hingga saat ini (Arifin, 2023; Armenia, 2015).

Dalam rangka mempererat kerja sama tersebut, Indonesia dan Mesir membentuk *Joint Trade Committee* (JTC) pada Mei 2023 di Kairo. Forum ini menjadi instrumen diplomasi ekonomi bilateral yang dirancang guna memperkuat hubungan dagang dan investasi, sekaligus membuka peluang kerja sama di sektor lain seperti ketahanan pangan, energi, dan pendidikan (Cicilia, 2023). Pembentukan JTC mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam merespons perlambatan ekonomi domestik dan kebutuhan untuk memperluas mitra dagang di luar kawasan Asia (Rachmawati & Meilanova, 2024).

Namun, meskipun pembentukan JTC menjadi langkah penting dalam diplomasi Indonesia, masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik membahas faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks kerja sama dengan Mesir. Sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroti aspek ekonomi atau hubungan bilateral secara umum tanpa menggunakan pendekatan teoritis yang menyeluruh. Hal ini menciptakan celah akademik yang perlu diisi untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia secara lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan Indonesia dalam membentuk JTC dengan Mesir pada tahun 2023. Dalam rangka menganalisisnya, penelitian ini menggunakan teori determinan kebijakan luar negeri dari William D. Coplin, yang mencakup empat komponen utama, yakni *foreign policy behavior*, *domestic politics*, *economic-military factors*, dan *international circumstances*. Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan *Global South*.

## **Kerangka Analisis**

Kerja sama JTC Indonesia–Mesir dapat dianalisis dengan kerangka William D. Coplin yang menyoroti empat determinan: *Foreign Policy Behavior*, *Domestic Politics*, *Economic–Military Factors*, dan *International Circumstances*. Pada *foreign policy*

*behavior*, Coplin membedakan *power politics* yang melihat hubungan internasional sebagai perebutan *influence* dan *security* dengan *issue politics* yang menekankan respons terhadap isu spesifik yang menyentuh *national or group interests*. Dalam logika *power politics*, negara berada dalam *power struggles* dan diklasifikasikan menurut status kekuatan (*great power/middle power/small power*), posisi terhadap tatanan yang ada (*status quo vs revisionist*), serta *policy style*: *aggressive* (*coercion, threats, intervention/blockade*) atau *passive* (*diplomacy, mediation, public communication*), dengan perhatian bukan hanya pada tujuan, melainkan juga cara bertindak.

*Domestic politics* membentuk arah luar negeri melalui (1) *regime type*: *democracy* dengan pemilu terbuka cenderung lebih lambat namun kurang ekspansionis, sedangkan *autocracy* yang minim *deliberation* sering di bawah *single-party control* lebih cepat mengambil keputusan (2) *political stability*: stabilitas memungkinkan perencanaan jangka panjang namun tidak menjamin perdamaian, sedangkan *instability* dapat memicu *diversionary foreign policy* guna mempersatukan dukungan dan mengalihkan perhatian dari permasalahan politik domestik, sekaligus menurunkan kapasitas representasi kepentingan nasional dan (3) *policy influencers* yang berinteraksi dua arah dengan pembuat keputusan di pemerintahan antara lain: *bureaucratic influencers* (*policy information & implementation*), *partisan influencers* (*aggregation of societal preferences*), *interest influencers* (*resources & constituency power*), serta *mass influencers*.

*Economic–military factors* dan *international circumstances* menentukan kapasitas serta constraint. Faktor ekonomi antara lain, *Gross National Product* (GNP), jumlah populasi, trade dependence dan secara militer, indikatornya meliputi *defense budget share, military doctrine* (*offense, defense, deterrence*), *manpower, training level, equipment capability*. Di ranah *international circumstances* terdapat: *geography* (*proximity to conflict*), *power asymmetry* dengan neighbors, *global leadership style* (*aggressive vs passive*), serta *alliances* dan *international regimes* membentuk *opportunity set* sekaligus membatasi otonomi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks kerja sama ekonomi bilateral dengan Mesir melalui pembentukan JTC tahun 2023. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang, dinamika, serta kompleksitas pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam konteks tertentu secara menyeluruh dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti siaran pers Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan pernyataan langsung dari pejabat tinggi negara, baik Presiden maupun Menteri terkait. Sementara itu, sumber sekunder dikumpulkan dari berbagai laporan berita yang relevan, artikel jurnal ilmiah, opini kebijakan, serta publikasi lain yang memiliki keterkaitan substansial terhadap kerja sama Indonesia–Mesir dalam forum JTC.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana data direduksi, dikategorikan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan kerangka konseptual William D. Coplin. Tema-tema tersebut meliputi empat determinan kebijakan luar negeri, seperti *foreign policy behavior, domestic politics,*

*economic-military factors*, dan *international circumstances*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri keterkaitan antara kondisi faktual dengan teori yang digunakan, serta mengidentifikasi pola-pola kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks pembentukan JTC dengan Mesir.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Foreign Policy Behavior: Great, Middle and Small Power**

Indonesia merupakan negara yang tergolong dalam klasifikasi *middle power*. Posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah ini terlihat dengan sangat jelas dalam pembentukan dan pengelolaan JTC bersama Mesir. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana Indonesia secara aktif menggunakan diplomasi ekonomi dan forum bilateral untuk memperluas pengaruhnya secara strategis di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Sebagai *middle power*, Indonesia tidak hanya terbatas pada kepentingan regional Asia Tenggara, tetapi juga berusaha menjangkau kawasan lain yang memiliki nilai strategis tinggi, seperti Afrika Utara, dalam hal ini Mesir yang memiliki posisi geopolitik sebagai pintu gerbang ke Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Jordaan, 2003).

Indonesia juga menunjukkan karakter khas *middle power* dalam penggunaan JTC sebagai instrumen untuk menciptakan arsitektur perdagangan bilateral yang lebih solid dan terarah. Melalui JTC, Indonesia tidak hanya membahas isu teknis perdagangan, tetapi juga menjajaki kerja sama yang bersifat struktural dan jangka panjang, seperti pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) hingga potensi *Free Trade Agreement* (FTA) (Rachmawati & Meilanova, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai *middle power* tidak pasif menunggu arus global, tetapi berinisiatif untuk membentuk aturan main perdagangan yang dapat memberikan manfaat strategis, baik untuk dirinya maupun bagi negara mitra.

### **Status Quo vs Revisionist**

Posisi Indonesia dalam konteks pembentukan dan pengelolaan JTC dengan Mesir mencerminkan karakteristik dari negara yang mendukung *status quo*, terutama dalam kerangka kebijakan luar negeri modern yang berorientasi pada stabilitas, kerja sama ekonomi internasional dan peningkatan kesejahteraan nasional melalui integrasi yang konstruktif ke dalam sistem ekonomi global yang ada. Meskipun pada periode awal kemerdekaannya Indonesia sempat menunjukkan kecenderungan *revisionist* misalnya dalam perjuangan melawan kolonialisme, pendirian Gerakan Non-Blok dan penggalangan kekuatan melalui Konferensi Asia Afrika (CNN Indonesia, 2023). Dalam konteks JTC dan hubungan ekonomi kontemporer dengan Mesir, Indonesia jelas menampilkan pola kebijakan yang sejalan dengan pendekatan *status quo*.

Sebagai negara *status quo*, Indonesia dalam konteks JTC menunjukkan komitmen terhadap mekanisme kerja sama bilateral yang difasilitasi secara formal dan berorientasi pada peningkatan hubungan dagang dalam kerangka tatanan ekonomi global yang telah mapan. Pembentukan JTC, berdasarkan Pernyataan Bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi tahun 2015 (Cicilia, 2023), menunjukkan kehendak Indonesia untuk membangun kemitraan jangka panjang berdasarkan prinsip saling menguntungkan dalam sistem perdagangan internasional. Dalam hal ini, Indonesia tidak menentang sistem internasional yang ada, melainkan mengoptimalkannya melalui keterlibatan aktif, negosiasi perjanjian, dan penciptaan jalur dialog yang terstruktur.

## Aggressive vs Passive

Dalam konteks *foreign policy behaviour* terhadap negara-negara di kawasan Afrika, posisi Indonesia memiliki kecenderungan sebagai negara yang pasif. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai inisiatif strategis, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara Afrika. Salah satu contoh paling representatif dari pendekatan ini adalah pembentukan JTC antara Indonesia dan Mesir yang secara resmi ditandatangani pada Mei 2023 (K. RI, 2023). Inisiatif ini tidak sekadar mencerminkan keinginan untuk memperluas kerja sama ekonomi bilateral, tetapi juga menunjukkan bagaimana Indonesia menggunakan *soft power* secara aktif untuk membangun pengaruh di luar kawasan Asia Tenggara.

Pendekatan Indonesia dalam membentuk JTC menunjukkan intensi strategis yang dalam. Mesir dipandang bukan hanya sebagai mitra dagang, melainkan sebagai pintu masuk penting ke kawasan Afrika, Timur Tengah, dan bahkan Eropa. Langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki agenda diplomatik yang berorientasi ke luar dan dirancang untuk menempatkan negara ini dalam jalur penting rantai ekonomi global. Dalam kerangka ini, Indonesia tidak menunggu tawaran kerja sama datang dari negara lain, melainkan secara aktif menyusun, menginisiasi, dan memimpin forum yang dapat memperluas jangkauan pengaruhnya. Upaya semacam ini adalah bentuk dari *foreign policy behaviour* yang lebih pasif. Meskipun *foreign policy behaviour* Indonesia tidak mengandalkan kekuatan militer tetapi ia menekan, mendesak dan membentuk norma serta struktur baru untuk menguntungkan kepentingan nasionalnya di panggung internasional.

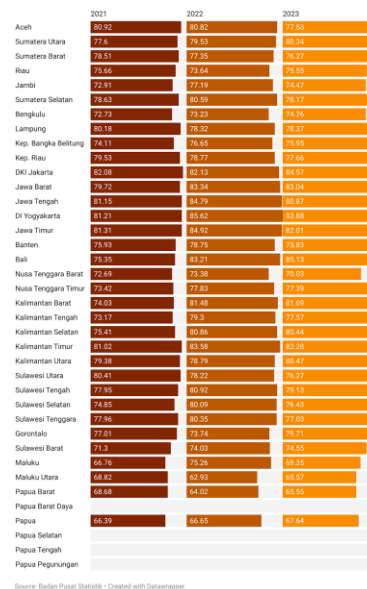
Di era modern, semangat tersebut dilanjutkan melalui *platform* seperti *Indonesia-Africa Forum* (IAF) yang diluncurkan pada April 2018. Forum ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia tidak meninggalkan kawasan Afrika sebagai mitra strategis jangka panjang. IAF menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan sosial budaya secara lebih sistematis (Sekretariat Republik Indonesia, 2024). Keaktifan Indonesia dalam mendorong hubungan ekonomi melalui PTA, kerja sama investasi, bahkan pengembangan industri di kawasan seperti *Suez Canal Economic Zone*, menunjukkan bahwa Indonesia menanamkan kepentingannya di kawasan secara terstruktur dan agresif.

## Domestic Politics

### Type of Government

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan performa yang relatif dinamis di berbagai wilayah (**Gambar 1**) (BPS Indonesia, 2024). Jenis pemerintahan Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan fondasi yang kuat dalam membentuk arah, gaya dan substansi kebijakan luar negerinya, termasuk dalam konteks kerja sama ekonomi bilateral seperti JTC dengan Mesir. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menjunjung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai ini turut tercermin dalam pendekatan diplomasi dan kerja sama luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak disusun semata oleh elit eksekutif secara tertutup, melainkan dibentuk melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan domestik, baik dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintahan (Delanova, 2018). Hal ini menjadikan arah kebijakan luar negeri Indonesia lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi serta dinamika politik domestik.

**Gambar 1.** Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi, 2021-2023



Sumber: Diolah oleh Penulis dari BPS, 2024

Pembentukan JTC Indonesia-Mesir adalah contoh nyata bagaimana sistem pemerintahan demokratis membuka ruang bagi keterlibatan aktor-aktor domestik dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri. Dalam sistem demokrasi, terdapat keterlibatan dari masyarakat sipil, pelaku usaha, asosiasi dagang, dan bahkan lembaga legislatif agar pemerintah memperjuangkan kepentingan nasional dalam setiap perjanjian bilateral yang ditandatangani. Dalam konteks JTC, kehadiran forum ini dimaksudkan tidak hanya sebagai sarana diplomasi antar negara, tetapi juga sebagai wadah dialog yang menjembatani kepentingan para pelaku ekonomi domestik dengan juga dilibatkannya 12 pelaku usaha Indo-nesia dan 120 pelaku usaha Mesir (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Hal ini mencerminkan kebijakan luar negeri yang demokratis, di mana suara masyarakat ekonomi turut berperan dalam memengaruhi arah negosiasi internasional.

## Domestic Political Stability

**Gambar 2.** Skor dan Peringkat *Global Peace Index* Negara-Negara Dunia 2024

RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	CHANGE
1	Iceland	1.112	↑	29	Qatar	1.056	↓	57	Zambia	1.948	↑
2	Ireland	1.303	↑	30	Luxembourg	1.061	↓	58	Cote d'Ivoire	1.95	↓
3	Austria	1.313	↑	31	Lithuania	1.072	↑	59	Kazakhstan	1.964	↑
4	New Zealand	1.323	↑	32	Poland	1.078	↓	60	Uzbekistan	1.967	↑
5	Singapore	1.339	↑	33	Italy	1.092	↑	61	Bosnia and Herzegovina	1.981	↓
6	Switzerland	1.35	↑	34	United Kingdom	1.103	↓	62	Namibia	1.972	↑
7	Portugal	1.372	↑	35	Monaco	1.146	↑	63	Moldova	1.976	↓
8	Denmark	1.382	↑	36	Romania	1.155	↑	64	Chile	1.978	↓
9	Slovenia	1.395	↓	37	Oran	1.161	↑	65	Tanzania	1.987	↑
10	Malaysia	1.427	↑	38	North Macedonia	1.164	↓	66	Saint Leone	1.993	↓
11	Canada	1.449	↓	39	Sweden	1.182	↓	67	Jordan	1.998	↓
12	Czechia	1.459	↓	40	Greece	1.193	↑	68	Bolivia	2.009	↓
13	Finland	1.474	↑	41	Vietnam	1.202	↓	69	Liberia	2.025	↑
14	Hungary	1.502	↑	42	Albania	1.209	↓	70	Cambodia	2.038	↓
15	Croatia	1.504	↑	43	Taiwan	1.218	↓	71	Tajikistan	2.035	↑
16	Belgium	1.51	↓	44	Madagascar	1.238	↑	72	Angola	2.043	↑
17	Japan	1.525	↓	45	Mongolia	1.245	↑	73	Paraguay	2.044	↓
18	Netherlands	1.527	↑	46	South Korea	1.248	↑	74	Turkey	2.044	↑
19	Australia	1.536	↑	47	Argentina	1.255	↑	75	Thailand	2.048	↑
20	Germany	1.542	↓	48	Indonesia	1.257	↓	76	Azerbaijan	2.052	↓
21	Bhutan	1.564	↑	49	Latvia	1.261	↑	77	Kirgiz Republic	2.053	↑
22	Mauritius	1.577	↑	50	Burkina Faso	1.263	↓	78	Monaco	2.054	↑
23	Spain	1.597	↑	51	Timor-Leste	1.282	↓	79	Malawi	2.063	↓
24	Estonia	1.615	↑	52	Uruguay	1.283	↑	80	Nepal	2.068	↓
25	Kuwait	1.622	↑	53	United Arab Emirates	1.287	↑	81	Bahrain	2.072	↑
26	Bulgaria	1.629	↑	54	Saudi Arabia	1.3	↑	82	The Gambia	2.079	↓
27	Slovakia	1.634	↓	55	China	1.308	↓	83	Tuvalu	2.079	↓
28	Norway	1.638	↓	56	Kosovo	1.345	↑				

Sumber: (Vision of Humanity, 2024)

Tingkat stabilitas politik domestik dapat dikatakan dinamis, dilihat dari indeks demokrasi yang meskipun Indonesia masih berada dalam kategori *flawed democracy* (Saputra, 2025), namun pada indikator lain dalam *Global Peace Index*, Indonesia berada pada urutan ke-48 dari 163 negara di dunia, Indonesia termasuk negara yang memiliki

*the state of peace* yang tinggi (Vision of Humanity, 2024). Kemudian, dalam sistem politik yang dinamis seperti Indonesia, di mana tekanan domestik dapat muncul dalam berbagai bentuk membuat pemerintah sering kali merespons dengan memperkuat dimensi eksternal sebagai bagian dari strategi stabilitas (Marliani & Nurhalimah, 2020). Kebijakan luar negeri yang diarahkan secara aktif pada penguatan hubungan ekonomi bilateral dan perluasan pasar ekspor, dalam hal ini dengan Mesir, tidak hanya mencerminkan tujuan ekonomi semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menstabilkan dan memperkuat posisi politik dalam negeri.

Dalam situasi politik domestik yang penuh tantangan, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya strategi diversifikasi pasar dan kemitraan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap mitra dagang tradisional dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Mesir dipilih sebagai mitra strategis bukan hanya karena hubungan historis yang erat dan posisi geopolitiknya yang penting, tetapi juga karena potensinya sebagai pintu masuk ke pasar regional Afrika dan Timur Tengah. Dengan membentuk JTC, Indonesia secara aktif mengembangkan jalur perdagangan alternatif yang dapat memperkuat fondasi ekonomi domestik di tengah potensi tekanan politik dalam negeri. Langkah ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi bukan semata-mata hasil kalkulasi perdagangan, melainkan juga respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperkuat stabilitas politik melalui pertumbuhan ekonomi yang terdiversifikasi.

### **Policy Influencers**

Dalam sistem politik demokratis yang dianut Indonesia, kebijakan luar negeri tidak dihasilkan dari keputusan sepihak atau otoriter, melainkan melalui interaksi kompleks antara berbagai aktor negara dan non-negara yang saling mempengaruhi dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konteks kerja sama ekonomi seperti JTC antara Indonesia dan Mesir, para pembuat keputusan kebijakan luar negeri Indonesia beroperasi dalam batas-batas sistem demokrasi yang menjamin akuntabilitas publik dan kontrol institusional. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, memang memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri, terutama dalam isu teknis seperti perdagangan bilateral (Pramana, 2023). Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Ia dibingkai oleh dinamika internal negara, baik melalui pengawasan legislatif maupun tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan domestik, termasuk pelaku usaha dan masyarakat sipil. Selain itu, aktor dari masyarakat sipil terutama dalam sektor ekonomi seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN) juga memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

Proses terbentuknya JTC dengan Mesir merupakan gambaran tentang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dirancang dalam ruang demokratis tetapi terkendali. Secara struktural, peran eksekutif sangat menonjol dalam inisiatif ini, ditunjukkan oleh keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam meresmikan rencana kerja sama bilateral pada 2015, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) JTC oleh Menteri Perdagangan pada 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa di bawah sistem presidensial Indonesia, kekuatan eksekutif dalam kebijakan luar negeri cukup besar. Namun demikian, dalam sistem politik yang demokratis dan multipartai seperti Indonesia, kebijakan luar negeri juga harus mengakomodasi persepsi dan reaksi domestik. Ketika JTC mulai membahas kemungkinan perjanjian perdagangan seperti PTA atau FTA, maka pengesahan dan implementasinya tetap memerlukan keterlibatan dan persetujuan parlemen. Dengan demikian, mekanisme *checks and balances* tetap berjalan, menjaga agar keputusan eksekutif tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Di sisi lain, kebebasan pembuat kebijakan luar negeri juga dibentuk oleh kekuatan dan kompetensi birokrasi teknis Indonesia, khususnya dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Dalam forum seperti JTC, birokrat teknis memainkan peran utama dalam merancang naskah kerja sama, mengidentifikasi peluang perdagangan dan menyelesaikan hambatan yang dihadapi pelaku usaha domestik. Namun demikian, tetap ada pengaruh dari aktor domestik non-pemerintah. Misalnya, dorongan dari aktor bisnis melalui lembaga seperti KADIN yang menghadapi tarif tinggi di Mesir yang kemudian memicu tuntutan agar pemerintah menegosiasikan penurunan hambatan tarif tersebut.

## **Economic-Military Factors**

### **Economic Strength**

Dari sisi GNP, Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Berdasarkan tabel di bawah, GNP Indonesia meningkat dari USD 1,028 triliun pada 2018 menjadi USD 1,353 triliun pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan kumulatif sekitar 31,6% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut menandakan *resilience* ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk tekanan signifikan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

**Tabel 1.** Data GNP Indonesia Tahun 2018-2023

No.	Tahun	GNP (US \$)
1.	2018	\$1.028T
2.	2019	\$1.097T
3.	2020	\$1.059T
4.	2021	\$1.143T
5.	2022	\$1.261T
6.	2023	\$1.353T

Sumber: (Macrotrends, 2024)

Pertumbuhan GNP ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menjalin kerja sama bilateral, khususnya dengan Mesir. Sebagai mitra dagang strategis, Mesir memandang Indonesia sebagai pemasok utama produk penunjang industrinya. Pertemuan bilateral dalam kerangka JTC pada 2023 menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan ekspor yang semuanya didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang menguat (Putri & Gandhi, 2023).

**Tabel 2.** Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2018-2023



No.	Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
1.	2018	265,0	1,33
2.	2019	268,1	1,31
3.	2020	270,2	1,25
4.	2021	272,7	1,22
5.	2022	275,8	1,17
6.	2023	278,7	1,13

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Sementara, dari sisi *population size*, Indonesia menunjukkan posisi strategis sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yakni mencapai 278,7 juta jiwa pada tahun 2023 (Macrotrends, 2024). Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan konsisten sejak tahun 2018, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tren menurun dari 1,33% menjadi 1,13% dalam lima tahun terakhir (Indonesia Investments, 2025). Penurunan laju ini merupakan indikasi dari transisi demografi yang umum terjadi di negara berkembang, di mana tingkat kelahiran menurun seiring peningkatan tingkat pendidikan, urbanisasi, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Kekuatan populasi Indonesia juga dapat diamati melalui dominasi kelompok usia produktif, di mana sekitar 66,5% penduduknya berada pada rentang usia 15–64 tahun, yang merepresentasikan potensi tenaga kerja dan konsumen domestik yang besar (Indonesia Investments, 2025). Besarnya *population size* ini memungkinkan negara untuk memobilisasi kekuatan demografinya untuk mendukung kepentingan nasional, terutama dalam memperkuat posisi tawar dan menentukan prioritas kerja sama bilateral yang strategis, seperti dengan Mesir.

**Tabel 3.** Ekspor dan Impor Indonesia - Mesir Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Total Ekspor	Total Import
1.	2018	\$1.28B	\$190M
2.	2019	\$1.16B	\$91.5M
3.	2020	\$1.23B	\$148M
4.	2021	\$1.86B	\$136M
5.	2022	\$1.69B	\$350M
6.	2023	\$1.53B	\$197M

Sumber: (OEC, 2024)

Data di atas memperlihatkan nilai ekspor Indonesia ke Mesir menunjukkan tren yang fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar \$1,86 miliar dan terendah pada tahun 2019 sebesar \$1,16 miliar. Sementara itu, impor Indonesia dari Mesir relatif lebih rendah, berkisar antara \$91,5 juta hingga \$350 juta, hal ini mengindikasikan posisi Mesir sebagai pasar sekunder dalam strategi perdagangan Indonesia (The Observatory of Economic Complexity, 2025). Ketergantungan perdagangan ini menandakan posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang penting bagi Mesir. Meskipun Mesir bukan mitra

dagang utama Indonesia, ketergantungan Mesir terhadap produk-produk Indonesia memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan bilateral.

Apabila dilihat melalui *Stages of Economic Growth* dari W.W. Rostow, posisi ekonomi Indonesia pada periode 2018–2023 lebih tepat diklasifikasikan berada dalam tahap *take-off*. Indonesia memperlihatkan karakteristik tahap ini melalui peningkatan GNP dari USD 1,028 triliun pada 2018 menjadi USD 1,353 triliun pada 2023 (Macrotrends, 2024). Realisasi investasi Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa dalam lima tahun terakhir, meningkat dari Rp 721,3 triliun pada 2018 menjadi Rp 1.418 triliun pada 2023 (Annur, 2024). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis dan menjelaskan mengapa Indonesia mulai memanfaatkan kekuatan ekonomi dan perdagangan strategisnya, seperti melalui JTC dengan Mesir.

### **Military Strength**

Sepanjang 2018–2023, Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dalam alokasi anggaran militernya, dari USD 7,49 miliar pada 2018 menjadi USD 11,3 miliar pada 2023 (SIPRI, 2024). Meningkatnya *military expenditure* merepresentasikan intensi negara untuk memperkuat daya pengaruhnya, baik sebagai alat negosiasi maupun sebagai jaminan kestabilan kawasan.

**Tabel 4.** Military Expenditure Indonesia Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Military Expenditure (USD Million)
1.	2018	7.49K
2.	2019	8.15K
3.	2020	9.39K
4.	2021	8.8K
5.	2022	10.1K
6.	2023	11.3K

Sumber: (SIPRI, 2024)

Doktrin militer Indonesia yang saat ini berlandaskan pada Sistem Pertahanan Semesta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, mengedepankan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam pertahanan negara dengan TNI sebagai komponen utama (Danga, 2023). Doktrin ini tidak agresif-ekspansionis, tetapi lebih bersifat defensif-integratif, yang selaras dengan preferensi Indonesia dalam diplomasi multilateral dan penghindaran konflik terbuka. Posisi Indonesia yang tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan militer regional yang ofensif memungkinkan fleksibilitas dalam membangun hubungan perdagangan strategis, seperti dengan Mesir, tanpa memicu sensitivitas geopolitik di kawasan Timur Tengah atau Asia Tenggara.

Sepanjang 2018–2023, Indonesia mempertahankan jumlah personel militer yang relatif tinggi. Pada 2018, tercatat 435.000 personel aktif dan 540.000 cadangan (Hardoko, 2018). Tahun berikutnya, pada 2019, jumlahnya tetap konsisten dengan 400.000 personel aktif dan 400.000 cadangan (Kennedy & Ardanareswari, 2019). Di tahun 2020 dan 2021, jumlah personel aktif berada di kisaran 395.500 hingga 400.000 (Annur, 2024). Sementara pasukan cadangan stabil di angka 400.000, dengan tambahan 280.000 personel paramiliter (Kusnandar, 2021). Pada 2022 mencatatkan di angka 395.500 personel aktif dan 404.500 personel aktif pada 2023 (Ayuningtyas, 2024).

Tren ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada modernisasi alutsista, tetapi juga secara konsisten memelihara *human capital* militernya dalam jumlah besar. Hal tersebut menjadi nilai strategis ketika Indonesia menjalin kemitraan perdagangan dengan negara seperti Mesir, yang menempatkan stabilitas kawasan dan kesiapan domestik sebagai elemen pertimbangan dalam kerja sama jangka panjang.

Indikator *degree of training* juga berperan sebagai aset strategis yang menopang kredibilitas Indonesia sebagai mitra bilateral yang stabil dan dapat dipercaya. Kualitas pelatihan militer Indonesia terlihat dari profesionalisme satuan-satuan elit seperti Kopassus yang dikenal memiliki metode latihan ekstrem seperti *dropper* (CNN. Indonesia, 2024). Begitu pula Paskhas yang memiliki kompetensi tempur lintas matra (Galih, 2018).

Selain itu, TNI AU telah melaksanakan 28 latihan bersama selama 2017–2019, yang terbukti efektif dalam meningkatkan *confidence building measures* (CBM) melalui indikator komunikasi, transparansi, konsultasi, dan *goodwill* (Ferisetiadi et al., 2022). Tingkat kesiapan prajurit Indonesia yang tinggi, ditopang oleh doktrin dan latihan tempur reguler, memberikan sinyal ke negara-negara mitra, termasuk Mesir, bahwa Indonesia memiliki *military professionalism* yang dapat menjadi fondasi kuat dalam menjalin kerja sama strategis lintas sektor, termasuk dalam diplomasi ekonomi dan teknologi pertahanan. *Degree of training* di sini menjadi elemen *confidence building* yang memperkuat *trust* dalam hubungan bilateralnya dengan Mesir.

Berdasarkan data Global Firepower, posisi kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-15 dunia pada 2018 dengan jumlah 41 jet tempur, 197 helikopter, 418 tank, 456 artileri, serta 153 peluncur roket, ditambah 221 kapal perang, termasuk 8 fregat dan 3 kapal selam (Hardoko, 2018). Data ini menandakan adanya keseimbangan antara kapasitas ofensif seperti jet tempur SU-30 dan peluncur Astros II MK6, serta kemampuan defensif seperti kapal patroli dan sistem pengawasan udara. Posisi ini relatif stabil pada 2019 ketika Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia, dengan kekuatan udara 192 helikopter (termasuk 8 helikopter tempur), 36 peluncur misil, dan kehadiran pasukan elite seperti *Kopassus*, yang disebut sebanding dengan lima prajurit reguler (Perwitasari & Thomas, 2019).

Pada tahun 2020 dan 2021, modernisasi alutsista tetap menjadi fokus, meskipun terjadi penurunan dalam jumlah pesawat tempur yang aktif. Data 2020 menyebutkan hanya terdapat 41 pesawat tempur aktif dari total 462 kekuatan udara (Puspita, 2023). Namun, Indonesia tetap berada di peringkat ke-28 dunia, tertinggi di Asia Tenggara untuk total armada. Pada 2022, Global Firepower menempatkan Indonesia kembali di posisi ke-15 dengan kekuatan udara 445 unit, termasuk 23 *dedicated attack aircraft* dan 15 helikopter serang Apache AH-64E yang memperkuat *precision strike capability* Indonesia (Farmita, 2022). Tahun 2023 memperlihatkan adanya rencana penguatan strategis dengan pembelian F-15 EX dan Dassault Rafale, yang menunjukkan niat Indonesia untuk terus meningkatkan *air dominance* sebagai bagian dari strategi pertahanan regionalnya (Puspita, 2023).

Dalam hal *nuclear possession*, Indonesia secara konsisten menegaskan posisi *nuclear-weapon-free*. Sejak 2013, Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan regional mengenai dampak kemanusiaan senjata nuklir, lalu ikut serta dalam *humanitarian pledge* tahun 2015–2016 untuk menghapus senjata nuklir (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2025). Komitmen ini berlanjut dengan penandatanganan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) pada 20 September 2017 oleh

Menlu Retno Marsudi, sebagai bentuk penolakan atas legitimasi kepemilikan senjata nuklir (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2025).

Selama periode 2018–2022, Indonesia secara konsisten menyuarakan *moral imperative* untuk perlucutan nuklir dalam forum-forum internasional. Dalam pidato di PBB tahun 2021 dan 2022, Indonesia menekankan bahwa TPNW melengkapi *Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan bahwa dunia bebas nuklir merupakan syarat mutlak untuk ketahanan umat manusia (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2025). Dalam studi kasus ini, absennya senjata nuklir dalam arsenal Indonesia justru meningkatkan kredibilitas dan legitimasi etisnya di mata negara-negara mitra. Alih-alih membangun *strategic tension* sebagaimana yang mungkin ditimbulkan oleh negara dengan *nuclear deterrence*, posisi *nuclear-free* Indonesia membuka ruang diplomasi ekonomi yang lebih inklusif, damai, dan berbasis saling percaya.

## **International Circumstances**

### **Geographical Location**

Indonesia terletak di persilangan antara Benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Hindia (Ayu & Ira, 2024). Indonesia berada dalam kawasan Asia Tenggara, sementara Mesir sebagai kekuatan regional di *Middle East-North Africa* (MENA) (Fatimah, 2024). Indonesia menerapkan strategi *concentric circle* dalam kebijakan luar negerinya, di mana kawasan terdekat (ASEAN), disusul oleh kawasan seperti Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika (Setiawan, 2020). Strategi ini menetapkan prioritas berdasarkan *geographic proximity*, dengan ASEAN sebagai *inner circle* yang paling vital karena berkaitan langsung dengan isu stabilitas politik dan keamanan kawasan.

Mesir sebagai negara penghubung antara Afrika dan Timur Tengah, berada dalam lingkaran luar yang mulai diperkuat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, seiring dengan perluasan makna *inner circles* yang kini tak hanya bersifat geografis, tetapi juga berbasis *strategic economic interest*. Hal ini terlihat dari fakta bahwa lapisan luar (*outer concentric circles*) tidak lagi dibatasi oleh jarak fisik, tetapi diukur berdasarkan nilai ekonomi dan politik yang dapat diperoleh Indonesia (Fatimah, 2024). Mesir tidak dipilih karena jaraknya, melainkan karena perannya sebagai simpul geopolitik dan geostrategis di kawasan MENA yang relevan untuk ekspansi perdagangan dan diversifikasi mitra luar negeri Indonesia.

### **Military and Economic Strengths of Neighbors**

Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat militer tertinggi secara konsisten sepanjang 2018–2023 menurut *Global Firepower*, dengan posisi naik dari peringkat ke-15 (2018) ke peringkat ke-13 (2023), menjadikannya kekuatan militer utama di kawasan (Global Firepower, 2023). Dibandingkan dengan Vietnam (peringkat 23), Thailand (25), dan Malaysia (42), Indonesia berada pada posisi unggul secara kapabilitas militer (Global Firepower, 2023). Dominasi ini memberikan *leverage* bagi Indonesia untuk memainkan peran sebagai *regional power*, namun juga menciptakan tanggung jawab untuk mengamankan keunggulan tersebut melalui diversifikasi hubungan strategis, termasuk melalui mekanisme seperti JTC dengan Mesir.

Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia (*real GDP growth*) pasca-pandemi relatif stabil di kisaran 5,0% per tahun selama 2021–2023. Namun demikian, Vietnam dan Filipina mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, Vietnam sebesar 8,1%

(2022) dan Filipina 7,6% (2022) yang menunjukkan bahwa posisi ekonomi Indonesia di Asia Tenggara *increasingly contested* oleh tetangganya (International Monetary Fund, 2019). Ketatnya kompetisi regional ini mendorong Indonesia untuk mencari *economic and strategic depth* di luar kawasan Asia Tenggara, di mana Mesir muncul sebagai mitra potensial dengan keunggulan geopolitik sebagai pintu masuk Afrika dan Timur Tengah. Keterlibatan dalam JTC dengan Mesir dapat dibaca sebagai *strategic signaling* bahwa Indonesia tidak semata bergantung pada dinamika intra-ASEAN, tetapi juga aktif membangun poros baru untuk diversifikasi diplomatik dan perdagangan.

### **Existence of Aggressive or Passive Governments**

Mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Thailand yang menampilkan watak *passive governments* dalam isu-isu global, hal ini bisa dilihat dalam menyikapi pelanggaran HAM oleh junta militer Myanmar (Ambarwati, 2022). Meski terjadi represi brutal pascakudeta 2021, ASEAN secara kolektif cenderung mempertahankan prinsip *non-interference* sebagaimana tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan keengganan untuk melakukan intervensi langsung. Bahkan ketika negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura mulai menunjukkan penolakan simbolik terhadap kehadiran Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN, tindakan tersebut tidak disertai dengan sanksi substantif atau tekanan ekonomi yang mengindikasikan kebijakan luar negeri yang benar-benar konfrontatif (International Monetary Fund, 2019). Dominasi *passive governments* di sekitar Indonesia berimplikasi langsung pada implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus JTC Indonesia–Mesir. Ketidakhadiran tekanan dari lingkungan regional yang *aggressive* memberi keleluasaan bagi Indonesia untuk mengambil inisiatif-inisiatif bilateral strategis dengan Mesir tanpa harus menyesuaikan diri secara defensif.

### **Alliance Agreements**

Meskipun Indonesia secara resmi tidak tergabung dalam aliansi militer internasional, beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia, memiliki komitmen pertahanan formal dengan kekuatan besar dunia. Singapura, misalnya, menjalin *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) dengan Amerika Serikat yang mencakup dukungan logistik, latihan gabungan, hingga penempatan pesawat tempur AS di kawasan (U.S. Department of Defense, 2015).

Malaysia dan Singapura juga merupakan anggota dari *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) bersama dengan Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Aliansi ini mencakup komitmen untuk berkonsultasi dalam menghadapi serangan bersenjata terhadap Malaysia dan Singapura, serta rutin menggelar latihan militer gabungan (FPDA, 2014). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua negara Asia Tenggara memiliki aliansi formal, kehadiran struktur pertahanan seperti FPDA dan EDCA menunjukkan adanya *external military entanglement* yang memperluas aktor strategis di sekitar Indonesia. Kondisi ini menguatkan urgensi Indonesia untuk menjaga posisi netral dan strategisnya, termasuk dalam membina hubungan dagang seperti JTC dengan Mesir.

### **Mutual Problems leading to International Issues**

Permasalahan krisis pangan yang diperparah oleh stagnasi produktivitas pertanian dan kerentanan iklim telah menyebabkan 22,1 juta penduduk Asia Tenggara mengalami malnutrisi akut pada 2022, sementara lebih dari 125 juta orang berada dalam kondisi

kekurangan gizi kronis (Randhawa, 2017). Indonesia memilih untuk menempuh pendekatan bilateral di luar kawasan guna memperluas jalur solusi ketahanan pangan dan perdagangan melalui kemitraan strategis, salah satunya dengan Mesir. Pembentukan JTC ini tidak secara langsung dirancang sebagai mekanisme penyelesaian krisis pangan Asia Tenggara. Namun, kerja sama ini memiliki implikasi strategis terhadap isu tersebut karena membuka saluran perdagangan alternatif melalui skema *counter-trade* dan tren surplus perdagangan 2019-2023 didorong oleh produk pertanian dan pangan seperti minyak sawit, kopi, kelapa dan olahannya, rempah-rempah, yang semuanya berakar pada sektor ketahanan pangan dan agroindustri, sehingga mendukung ketahanan pangan regional dan kebutuhan industri Mesir (Hasbullah, 2023). Dengan demikian, surplus perdagangan Indonesia–Mesir yang berkelanjutan bukan hanya menunjukkan kekuatan ekspor, tetapi juga merupakan manifestasi dari respons diplomatik terhadap tantangan ketahanan pangan regional. Mesir, sebagai negara di kawasan MENA yang juga menghadapi *problem* pangan struktural, menjadi mitra strategis dalam memperluas jalur distribusi pangan Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika. Indonesia dan Mesir memiliki pandangan yang serupa dalam menanggulangi isu krisis pangan, yaitu dengan sama-sama memprioritaskan penguatan sektor pertanian, diversifikasi sumber pangan, dan perluasan jalur perdagangan pangan internasional.

### **Kesimpulan**

Kerja sama bilateral Indonesia–Mesir dalam kerangka *Joint Trade Committee* (JTC) merefleksikan dominasi determinan ekonomi dan kalkulasi strategis berbasis *national power* dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, bonus demografi, dan ketergantungan Mesir pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia memperkuat *bargaining position* Indonesia. Pendekatan ekonomi yang proaktif menegaskan peran Indonesia sebagai *middle power* dan pro terhadap *status quo*. Di ranah domestik, konfigurasi politik demokratis memungkinkan keterlibatan *non-state actors* (pelaku usaha dan masyarakat sipil) dalam proses perumusan dan pengawalan kebijakan, sementara tekanan ekonomi internal menjadikan JTC instrumen stabilisasi yang selaras dengan kebutuhan pemulihan. Secara eksternal, strategi diversifikasi mitra ke kawasan MENA, posisi *non-aligned*, serta kesesuaian agenda pada isu ketahanan pangan dan arsitektur perdagangan global memperkuat relevansi Mesir sebagai mitra.

Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk memperkuat fondasi tersebut. Pemerintah perlu mempercepat finalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) dan memperkuat kelembagaan JTC melalui *capacity building* teknis, koordinasi lintas-kementerian, dan institusionalisasi kalender pertemuan yang berkelanjutan guna menghadirkan kepastian regulasi dan efektivitas implementasi. Keterlibatan *non-state actors* perlu diintensifkan untuk memperkaya *policy feedback loop*, meningkatkan akurasi informasi pasar, dan memastikan responsivitas terhadap kebutuhan industri domestik.

Arah pengembangan kerja sama sebaiknya diperluas ke sektor bernilai tambah jangka panjang, seperti *renewable energy*, *non-traditional security*, *vocational education*, dan *creative industries* untuk memperdalam keterkaitan ekonomi. Indonesia dapat diposisikan sebagai pusat rantai logistik kawasan bagi ekspor Mesir ke ASEAN melalui peningkatan infrastruktur logistik, *digital trade facilitation*, dan harmonisasi *cross-border regulations*. Di samping itu, pembentukan mekanisme *joint risk management* untuk *supply chains* (pangan, pupuk, energi) serta kerja sama pada domain *maritime security* akan melengkapi peluang kerjasama antar negara, memperkuat resiliensi, dan mengoptimalkan relasi yang selama ini sudah terjalin antara kedua negara.

### Daftar Pustaka

- Ambarwati, A. (2022). SIKAP ASEAN TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR PASCA KUDETA. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 20–36. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3360>
- Annur, C. M. (2024). Lampau Target, Realisasi Investasi 2023 Capai Rp1.418 Triliun. In *Katadata.co.id*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/4d5fbda69f89771/lampau-target-realisasi-investasi-2023-capai-rp1418-triliun>
- Arifin, S. (2023). Joko Widodo's "Bebas-Aktif" Foreign Policy Approach: Continuity and Change. *Muslim Politics Review*, 2(2), 318–340. <https://doi.org/10.56529/mpr.v2i2.205>
- Armenia, R. (2015). Indonesia-Mesir Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi. In *internasional*. *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150905005402-127-76760/indonesia-mesir-sepakat-tingkatkan-kerjasama-ekonomi>
- Ayu, R. D., & Ira, L. (2024). Mengenal Letak Geografis Indonesia, Batas, dan Dampaknya. In *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/mengenal-letak-geografis-indonesia-batas-dan-dampaknya-1182181>
- Ayuningtyas, A. D. (2024). Masuk 79 Tahun, Simak Data Terbaru Jumlah Personel dan Anggaran TNI. In *Goodstats.id*. <https://goodstats.id/article/masuk-79-tahun-ini-jumlah-personel-dan-anggaran-tni-TGvWs>
- Cicilia, M. (2023). Pertemuan Indonesia-Mesir capai kontrak dagang senilai Rp12,88 triliun. In *Antara News*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3539814/pertemuan-indonesia-mesir-capai-kontrak-dagang-senilai-rp1288-triliun>
- Complexity, T. O. of E. (2025). Indonesia (IDN) and Egypt (EGY) Trade | OEC. In *OEC - The Observatory of Economic Complexity*. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/idn/partner/egy>
- Danga, C. M. (2023). Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 104–115. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2329>
- Defense, U. S. D. of. (2015). Carter, Singapore Defense Minister Sign Enhanced Defense Cooperation Agreement. In *U.S. Department of Defense*. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/633243/carter-singapore-defense-minister-sign-enhanced-defense-cooperation-agreement/>
- Delanova, M. O. (2018). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI. *Jurnal Dinamika Global*, 2(02), 154–172. <https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.40>
- Farmita, A. R. (2022). Militer Indonesia Rangking 15 Dunia, Ini Sederet Alutsista Andalan TNI. In *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/23/061546481/militer-indonesia-rangking-15-dunia-ini-sederet-alutsista-andalan-tni>
- Fatimah, Z. S. (2024). Mesir sebagai Kekuatan Regional. In *kumparan*. <https://kumparan.com/fozella6/mesir-sebagai-kekuatan-regional-23nOWoBxkms>
- Ferisetiadi, P., Bainus, A., & Herdiansyah, A. G. (2022). PENGUATAN DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI LATIHAN BERSAMA TNI ANGKATAN UDARA. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i1.38867>
- Firepower, G. (2023). 2023 Military Strength Ranking. In *www.globalfirepower.com*. <https://www.globalfirepower.com>
- FPDA, G. (2014). FPDA. In *FPDA*. <https://www.fivepowerdefencearrangements.org>

- /governance
- Fund, I. M. (2019). World Economic Outlook Databases. In *IMF*.  
<https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases>
- Galih, B. (2018). Mengenal 6 Pasukan Elite dalam Jajaran TNI... In *KOMPAS.com*.  
Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/05/18553521/mengenal-6-pasukan-elite-dalam-jajaran-tni?page=all>
- Hardoko, E. (2018). Survei: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia. In *KOMPAS.com*.  
Kompas.com. <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/08/15444031/survei-militer-indonesia-terkuat-ke-15-di-dunia?page=all>
- Hasbullah, A. H. (2023). Indonesia and Egypt Sign Counter-Trade Agreement to Boost Bilateral Trade - Jakarta Daily. In *Indonesia and Egypt Sign Counter-Trade Agreement to Boost Bilateral Trade - Jakarta Daily*. Jakarta Daily.  
<https://www.jakartadaily.id/market-finance/1628790975/indonesia-and-egypt-sign-counter-trade-agreement-to-boost-bilateral-trade>
- Humanity, V. of. (2024). Global Peace Index. In *Vision of Humanity*.  
<https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>
- Indonesia, B. P. S. (2024). [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi - Tabel Statistik. In *www.bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>
- Indonesia, C. N. N. (2023). Sejarah dan Tujuan Konferensi Asia Afrika 1955. In *edukasi*.  
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231102144846-569-1019163/sejarah-dan-tujuan-konferensi-asia-afrika-1955>
- Indonesia, C. N. N. (2024). Apakah Kopassus Masih Masuk 10 Besar Pasukan Khusus di Dunia? In *internasional*. *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241008131817-106-1152878/apakah-kopassus-masih-masuk-10-besar-pasukan-khusus-di-dunia>
- Indonesia, S. K. R. (2024). Indonesia-Africa Forum Jadi Aksi Nyata dan Kolaborasi Membangun Masa Depan. In *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.  
<https://setkab.go.id/indonesia-africa-forum-jadi-aksi-nyata-dan-kolaborasi-membangun-masa-depan/>
- Investments, I. (2025). Populasi Indonesia - Penduduk - Demografi & Potensi Ekonomi | Indonesia Investments. In *Indonesia-investments.com*. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/budaya-masyarakat-indonesia/penduduk-indonesia/item67>
- Jordaan, E. (2003). The Concept of a Middle Power in International relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers. *Politikon*, 30(1), 165–181.
- Karim, M. F. (2021). Role Legitimation in Foreign Policy: The Case of Indonesia as an Emerging Power under Yudhoyono's Presidency (2004–2014). *Foreign Policy Analysis*, 17(3). <https://doi.org/10.1093/fpa/orab010>
- Kennedy, E. S., & Ardanawati, I. (2019). Laskar Putri Indonesia, Prajurit Perempuan dari Solo. In *tirto.id*. Tirto.id. <https://tirto.id/kekuatan-militer-indonesia-2019-dari-senjata-hingga-pasukan-khusus-ehOn>
- Kusnandar, V. B. (2021). Global FirePower: Indonesia Miliki 1,08 juta Personil Militer pada 2021. In *Katadata.co.id*. Databoks.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/global-firepower-indonesia-miliki-108-juta-personil-militer-pada-2021>
- Macrotrends. (2024). Indonesia Population 1950-2024. In *Macrotrends.net*.  
<https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/IDN/indonesia/population>
- Marliani, W., & Nurhalimah, S. (2020). DINAMIKA POLITIK DALAM PERSPEKTIF



- KEPEMIMPINAN DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1). <https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i1.931>
- Perwitasari, N. H., & Thomas, V. F. (2019). Industri Lesu, INDEF: Pemerintah Terlambat Antisipasi Barang Impor. In *tirto.id*. Tirto.id. <https://tirto.id/kekuatan-militer-indonesia-2019-dari-senjata-hingga-pasukan-khusus-efpD>
- Pramana, D. A. (2023). KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH TRIUMVIRAT PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP. *SETARA Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 55. <https://doi.org/10.59017/setara.v4i2.438>
- Puspita, M. D. (2023). Jumlah Pesawat Tempur Indonesia. In *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1749439/jumlah-pesawat-tempur-indonesia>
- Putri, R. S., & Gandhi, G. (2023). Duta Besar RI Temui Asisten Menperindag Mesir, Bahas Tindaklanjut Pembentukan Komite Perdagangan. In *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/duta-besar-ri-temui-asisten-menperindag-mesir-bahas-tindaklanjut-pembentukan-komite-perdagangan-155285>
- Rachmawati, D., & Meilanova, D. R. (2024). RI & Mesir Bahas Rencana Jalin Kerja Sama Perdagangan Bebas. In *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240803/12/1787867/ri-mesir-bahas-rencana-jalin-kerja-sama-perdagangan-bebas>
- Randhawa, D. S. (2017). The Challenge of Food (In)security in ASEAN. In *@RSIS\_NTU*. <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/the-challenge-of-food-insecurity-in-asean/>
- RI, K. (2023). Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Joint Trade Committee (JTC) Indonesia-Mesir - Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. In *Kemendag.go.id*. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/2023-05-25-penandatanganan-nota-kesepahaman-mou-joint-trade-committee-jtc-indonesia-mesir>
- RI, K. P. (2023). Indonesia Mesir Teken Kontrak Rp 12,8 T: Top, Zulhas Sukses Pimpin Misi Dagang. In *kemendag.go.id*. Kementerian Perdagangan RI. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-mesir-teken-kontrak-rp-128-t-top-zulhas-sukses-pimpin-misi-dagang-1684333274>
- Saputra, Y. (2025). Catatan Perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia. In *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-perbaikan-indeks-demokrasi-indonesia-lt67db93bb1e2a6/>
- Setiawan, A. (2020). CONCENTRIC CIRCLE STRATEGY IN INDONESIAN FOREIGN POLICY UNDER JOKO WIDODO ADMINISTRATION . *Umj.Ac.Id*. [https://doi.org/http://repository.umj.ac.id/21558/1/Concentric\\_Circle\\_Strategy\\_in\\_Indonesian.pdf](https://doi.org/http://repository.umj.ac.id/21558/1/Concentric_Circle_Strategy_in_Indonesian.pdf)
- Simatupang, H. Y., & Panggabean, M. R. (2022). The Implementation of Indonesia's Free and Active Foreign Policy Over the Russia-Ukraine War During Indonesia's G20 Presidency. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*, 710, 590–602. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7\\_49](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_49)
- SIPRI. (2024). SIPRI Military Expenditure Database | SIPRI. In *Sipri.org*. <https://www.sipri.org/databases/milex>
- Tutukansa, A. F. (2023). The Future of Relations between Indonesia and the Middle East Region in Terms of Geopolitics as Indonesia's 2020-2024 Strategic Plan. *Journal of Political And Legal Sovereignty*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i1.31>
- Weapons, I. C. to A. N. (2025). Indonesia. In *ICAN*. <https://www.icanw.org/indonesia>